



**ANALISIS KESIAPAN PUSDIKLAT BMKG
MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN
UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN SDM TERINTEGRASI
(CORPORATE UNIVERSITY)**

**OLEH
WIDADA SULISTYA
WIDY AISWARA AHLI UTAMA
PUSDIKLAT BMKG**

**BPSDM Propinsi Jawa Tengah
Semarang, Desember 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Naskah Orasi yang berjudul “**ANALISIS KESIAPAN PUSDIKLAT BMKG MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN UNTUK Mendukung Pengembangan SDM Terintegrasi (CORPORATE UNIVERSITY)**”. Naskah Orasi ini merupakan rangkuman dari Karya Tulis Ilmiah dalam rangka mengkaji tingkat kesiapan Pusdiklat BMKG untuk penerapan *Knowledge Management System*.

Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini, penulis telah banyak menerima masukan, saran dan dukungan dari Pimpinan, Pembinaan, dan teman sejawat serta pihak terkait lainnya. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Ibu Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, PhD selaku Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.
2. Bapak Dr. Adi Suryanto selaku Kepala Lembaga Administrasi Negara RI
3. Bapak Drs. Maman Sudarisman, DEA selaku Kepala Pusdiklat Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika serta selaku Pembimbing atas dukungan, saran dan masukan yang membangun untuk kelancaran Orasi Ilmiah.
4. Bapak Dr, Mohammad Aswad selaku pembimbing yang telah banyak atas arahan, dan sarannya sehingga KTI Orasi ini dapat selesai.
5. Keluarga, rekan, dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas semangat dan masukan yang membangun hingga terselesaikannya Naskah Orasi ini.

Penulis menyadari keterbatasannya, sehingga masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan, maka penulis berharap masukan dan saran untuk perbaikan. Atas masukan dan saran yang diberikan penulis ucapkan terimakasih

Jakarta, 5 Desember 2021

Penulis

Dr. Widada Sulistyia. DEA

196004061981031003

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*). Tujuan dari penerbitan Permen PANRB tersebut antara lain adalah untuk mendorong kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (Pemda) untuk berpartisipasi aktif dalam *Knowledge Management* yang dapat dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan dan *benckmarking* pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pada tahun 2020 pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah tersebut tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pengembangan karier, pemenuhan kebutuhan organisasi, dan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil. Dalam pasal 203 PP Nomor 17 tahun 2020 tersebut secara tegas disebutkan bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier, dilaksanakan melalui pendekatan Sistem (*Corporate University*). Dalam Sistem Pembelajaran Terintegrasi (*Corporate University*) perlu dukungan adanya Sistem Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management System*).

Memperhatikan perkembangan kebijakan pemerintah dalam pengembangan kompetensi PNS dengan pendekatan Sistem Pembelajaran Terintegrasi, yang salah satunya perlu adanya penerapan Manajemen Pengetahuan, maka penerapan Manajemen Pengetahuan adalah suatu keniscayaan bagi instansi pemerintah. Dalam rangka implementasi kebijakan pemerintah tersebut, diperlukan kajian tingkat kesiapan suatu instansi dalam penerapan Manajemen Pengetahuan, termasuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) BMKG.

Berdasarkan hasil survey mandiri di lingkungan staf Pusdiklat BMKG, tentang kesiapan penerapan BMKG *Corporate University*, dapat disampaikan gambaran umum tingkat kesiapan pada masing-masing aspek. Secara keseluruhan skor masing-masing aspek Uraian tingkat kesiapan pada masing – masing aspek,

kondisi Pusdiklat BMKG menuju *BMKG Corporate University* dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Kapasitas dan Kapabilitas Manajemen (3.27)
2. Moda - Moda Baru Pembentukan Pengetahuan dan *Knowledge Sharing* (3.54)
3. Sistem untuk Mengetahui Kebutuhan Pembelajar dan Menyediakan Kurikulum yang Memadai (3.14)
4. Kerjasama dan *Networking* dengan *Stakeholder* (3.27)
5. Sistem Pengawasan dan Evaluasi Pembelajaran (3.27)
6. Teknologi Pembelajaran (4.08)
7. Inovasi dalam Metode *Assessment* (3.16)
8. Tersedianya Atmosfer Pembelajaran yang Memberdayakan (*Enabling*) (3.43)
9. Organisasi Pembelajar (3.16)

Berdasarkan uraian di atas, belum tergambar secara khusus kondisi Sistem Manajemen Pengetahuan di Pusdiklat BMKG. Untuk itu maka diperlukan kajian tingkat kesiapan implementasi Sistem Manajemen Pengetahuan di Pusdiklat BMKG.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, selanjutnya dapat disusun rumusan masalah sebagai sebagai berikut :

Bagaimana kesiapan Pusdiklat BMKG dalam penerapan Manajemen Pengetahuan guna mendukung pengembangan SDM terintegrasi

1.3. Penelitian Sebelumnya

1. Secara umum, *Corporate University* dapat digambarkan sebagai suatu institusi pendidikan yang menciptakan personil yang kompeten untuk mendukung kinerja lembaga sesuai fungsinya dalam dunia yang bergerak dengan cepat, (Yuliani, 2019).
2. Sementara menurut Nike Mutiara Fauziah dkk (Fauziah, 2019), konsep *Corporate University* merupakan salah satu model pengembangan dari paradigma diklat konvensional menuju diklat era disruptif sebagai upaya perbaikan reformasi birokrasi bidang SDM berbasis *core bussines organization*

dengan pendekatan *human capital* yang menempatkan sumberdaya manusia aparatur sebagai investasi jangka panjang suatu organisasi.

3. Model 70-20-10 memungkinkan organisasi mengambil keuntungan dari setiap kesempatan belajar karena menawarkan manfaat untuk menciptakan elemen penting untuk menciptakan karyawan berkinerja tinggi. Tujuan pembelajaran tidak hanya memperkuat *performance* pegawai secara individu tetapi juga harus memperkuat *performance* organisasi, dan pembelajaran dilakukan dengan utilisasi *Knowledge Management System* dan menumbuhkan budaya belajar (Suharsono, 2019).



Gambar 2.1 : Model Pembelajaran Kemenkeu Corpu (Suharsono, 2019)

4. Pada kesempatan lain, Anna Maria (Maria, 2002) menyampaikan bahwa salah satu pilar penting dalam *Corporate University* adalah *Knowledge Management*, dimana idealnya *learning* di organisasi adalah *knowledge* yang dikumpulkan dan dialirkan melalui *Corporate University*.
5. Pada konsep Sistem Pengembangan SDM Terintegrasi (*Corporate University*) nampak jelas peran Sistem Manajemen Pengetahuan, sehingga penerapan Sistem Manajemen Pengetahuan menjadi suatu keniscayaan (Suharsono, 2020).
6. *Knowledge Management* mampu untuk menciptakan, mengkomunikasikan dan mengaplikasikan *knowledge* sebagai kemampuan untuk menciptakan dan

mempertahankan peningkatan nilai dari inti kompetensi bisnis (Safriadi, 2019).

7. Salah satu faktor pendukung *digital learning* dalam organisasi adalah adanya infrastruktur yang memadai untuk implementasi *digital learning*. Dari hasil penelitian Yudha Mardiansyah dan Tim (Mardiansyah dkk, 2020) terkait Kesiapan Infrastruktur TIK BMKG dalam Mewujudkan Transformasi Digital Learning telah disimpulkan bahwa infrastruktur TIK BMKG, khususnya jaringan komunikasi BMKG, dapat memenuhi kebutuhan operasional *digital learning*. Hal ini dikarenakan saat ini sistem infrastruktur TIK jaringan komunikasi BMKG telah terintegrasi dan interkoneksi, dengan kapasitas bandwidth sebesar 600 Mbps (Mardiansyah dkk, 2020).
8. Hasil kajian senada disampaikan oleh Regina Yulia Yasmin dan Tim (Yasmin dkk, 2020), bahwa kesiapan infrastruktur BMKG dapat dilihat dari hasil evaluasi nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam kajian tersebut disampaikan bahwa nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah 3.01 dengan predikat Baik, pada evaluasi tahun 2019 nilai ini telah menunjukkan capaian di atas nilai target pemerintah yaitu 2,6 (Yasmin dkk. 2020)
9. Untuk melihat bagaimana kesiapan SDM BMKG dalam berbagi pengetahuan, dapat dilihat hasil kajian Nina Amelia Sasmita (Sasmita, 2020). Dalam hasil kajiannya Nina Amelia menjelaskan kebiasaan berbagi pengetahuan yang ada di BMKG, artinya kajian tersebut menjelaskan bahwa di lingkungan BMKG telah terbentuk kebiasaan berinovasi, saling berbagi pengetahuan, membantu dan bekerja sama dan saling percaya antar pegawai. Lebih jauh lagi, kajian tersebut menjelaskan bahwa inovasi telah menjadi bagian dari budaya BMKG, baik melalui kebijakan organisasi maupun inisiatif pegawai. (Sasmita, 2020).
10. Seperti hasil kajian Arisman (2020) menjelaskan bahwa penerapan Manajemen Pengetahuan pada saat ini masih berfokus pada proses kegiatan belajar-mengajar, dengan penerapan *Learning Management System* (LMS) (Arisman, 2020)

Permen PANRB Nomor 14 tahun 2011 menjelaskan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penerapan Manajemen Pengetahuan guna mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di kementerian/lembaga dan Pemda, secara garis besar dapat disampaikan berikut ini:

A. Merencanakan Implementasi Manajemen Pengetahuan

1. Mengidentifikasi Konteks Manajemen Pengetahuan dalam Organisasi;
2. Mengidentifikasi Praktek Manajemen Pengetahuan dalam Organisasi;
3. Mengidentifikasi dan Melakukan Analisis Terhadap Para Pemangku Kepentingan;
4. Merumuskan Strategi Manajemen Pengetahuan;
5. Mengembangkan Strategi Manajemen Perubahan; dan
6. Mengembangkan Strategi Implementasi Manajemen Pengetahuan.

B. Mengimplementasikan Manajemen Pengetahuan

Menurut Permen PANRB Nomor 14 tahun 2011, tahap pengimplementasian Manajemen Pengetahuan pada dasarnya mencakup 4 (empat) kegiatan utama yaitu :

7. Pembentukan Kebiasaan;
8. Penyediaan Payung Regulasi;
9. Pemanfaatan Teknologi; dan
10. Penyelarasan Strategi Manajemen Pengetahuan dengan Strategi Manajemen Perubahan.

C. Evaluasi dan Penyempurnaan Manajemen Pengetahuan

Kegiatan pada tahap ini pada dasarnya merupakan aktivitas monitoring dan evaluasi, diikuti dengan serangkaian tindak lanjut untuk meningkatkan dan menyempurnakan kualitas pengetahuan yang dimiliki.

11. Mekanisme berkala penyempurnaan dan pengembangan pengetahuan;
 12. Pembangunan *Community Of Practice* (CoP); dan
 13. Perbaikan terus-menerus Tata Kelola dan Strategi Manajemen Pengetahuan.
- Dengan berpedoman kepada ke 13 (tiga belas) langkah seperti tersebut di atas, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah diharapkan dapat membangun Sistem Manajemen Pengetahuan,

BAB II PEMBAHASAN

2.1. Hasil Temuan

A. Hasil Analisis Parameter

Hasil analisis pada masing – masing parameter dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Hasil survei menunjukkan bahwa parameter Mengidentifikasi Konteks Manajemen Pengetahuan dalam Organisasi, 2 responden (5%) menyatakan sangat baik, 17 responden (41 %) menyatakan baik, sementara 13 responden (32%) menyatakan cukup baik, 7 responden (17 %) menyatakan kurang, dan 2 responden (5%) menyatakan sangat kurang. Secara keseluruhan **nilai rata – rata 3.2**, artinya tingkat kesiapan pada parameter ini adalah cukup.
2. Hasil survei menunjukkan bahwa parameter Mengidentifikasi Praktek Manajemen Pengetahuan dalam Organisasi, 1 responden (2%) menyatakan sangat baik, 15 responden (37 %) menyatakan baik, sementara 18 responden (44%) menyatakan cukup baik, 5 responden (12 %) menyatakan kurang, dan 2 responden (5%) menyatakan sangat kurang. Secara keseluruhan **nilai rata – rata 3.2**, artinya tingkat kesiapan pada parameter ini adalah cukup.
3. Hasil survei menunjukkan bahwa parameter Mengidentifikasi dan Melakukan Analisis Terhadap Para Pemangku Kepentingan, 0 responden (0%) menyatakan sangat baik, 15 responden (37 %) menyatakan baik, sementara 17 responden (41%) menyatakan cukup baik, 7 responden (17%) menyatakan kurang, dan 2 responden (5%) menyatakan sangat kurang. Secara keseluruhan **nilai rata – rata 3.1**, artinya tingkat kesiapan pada parameter ini adalah cukup.
4. Hasil survei menunjukkan bahwa parameter Merumuskan Strategi Manajemen Pengetahuan, 0 responden (0%) menyatakan sangat baik, 15 responden (37 %) menyatakan baik, sementara 14 responden (34%) menyatakan cukup baik, 10 responden (24%) menyatakan kurang, dan 2 responden (5%) menyatakan sangat kurang. Secara keseluruhan **nilai rata – rata 3.0**, artinya tingkat kesiapan pada parameter ini adalah cukup. Berdasarkan konfirmasi hasil wawancara, seperti disampaikan

Adityawarman (Koordinator WI BMKG) memang masih perlu perhatian untuk aspek Merumuskan Strategi Manajemen Pengetahuan, walaupun tingkat kesiapan masuk kategori cukup, karena hal ini sangat penting.

5. Hasil survei menunjukkan bahwa parameter Mengembangkan Strategi Manajemen Perubahan, 1 responden (2%) menyatakan sangat baik, 19 responden (46%) menyatakan baik, sementara 11 responden (27%) menyatakan cukup baik, 9 responden (22%) menyatakan kurang, dan 1 responden (2%) menyatakan sangat kurang. Secara keseluruhan nilai **rata – rata 3,2**, artinya tingkat kesiapan pada parameter ini adalah cukup.
6. Hasil survei menunjukkan bahwa parameter Mengembangkan Strategi Implementasi Manajemen Pengetahuan, 1 responden (2%) menyatakan sangat baik, 14 responden (34%) menyatakan baik, sementara 14 responden (34%) menyatakan cukup baik, 7 responden (17 %) menyatakan kurang, dan 5 responden (12%) menyatakan sangat kurang. Secara keseluruhan **nilai rata – rata 2,98**, artinya tingkat kesiapan pada parameter ini adalah kurang. Berdasarkan konfirmasi hasil wawancara, seperti disampaikan Adityawarman (Koordinator WI BMKG) aspek Mengembangkan Strategi Implementasi Manajemen Pengetahuan, perlu prioritas karena perannya yang penting untuk pengembangan ke depan.
7. Hasil survei menunjukkan bahwa parameter Pembentukan Kebiasaan, 0 responden (0%) menyatakan sangat baik, 13 responden (32%) menyatakan baik, sementara 23 responden (56%) menyatakan cukup baik, 4 responden (10 %) menyatakan kurang, dan responden (2%) menyatakan sangat kurang. Secara keseluruhan **nilai rata – rata 3,2**, artinya tingkat kesiapan pada parameter ini adalah cukup.
8. Hasil survei menunjukkan bahwa parameter Pembentukan Kebiasaan, 0 responden (0%) menyatakan sangat baik, 13 responden (32%) menyatakan baik, sementara 23 responden (56%) menyatakan cukup baik, 4 responden (10 %) menyatakan kurang, dan responden (2%) menyatakan sangat kurang. Secara keseluruhan **nilai rata – rata 3,2**, artinya tingkat kesiapan pada parameter ini adalah cukup.
9. Hasil survei menunjukkan bahwa parameter Penyediaan Payung Hukum dan Regulasi Manajemen Pengetahuan, 0 responden (0%) menyatakan

sangat baik, 5 responden (12%) menyatakan baik, sementara 21 responden (52%) menyatakan cukup baik, 12 responden (29%) menyatakan kurang, dan 3 responden (7%) menyatakan sangat kurang. Secara keseluruhan **nilai rata – rata 2,7**, artinya tingkat kesiapan pada parameter ini adalah kurang. Berdasarkan konfirmasi hasil wawancara, seperti disampaikan Maman Sudarisman (Kapusdiklat), pihak Pusdiklat belum menyiapkan produk hukum. Rencana berikutnya terkait hal ini akan dilakukan pembuatan produk hukum dan regulasinya, agar langkah pengembangan *Knowledge Management System* (KMS) berdasarkan hukum dan aturan yang ada. Hal senada disampaikan Iqbal (Koorbid Pengembangan Database), bahwa Penyediaan Payung Hukum belum cukup karena memang belum tersedianya peraturan atau pedoman SOP yang baku sebagai turunan dari aturan terhadap KMS.

10. Hasil survei menunjukkan bahwa parameter Pemanfaatan Teknologi untuk Manajemen Pengetahuan, 2 responden (5%) menyatakan sangat baik, 24 responden (58%) menyatakan baik, sementara 12 responden (29%) menyatakan cukup baik, 2 responden (5%) menyatakan kurang, dan 1 responden (2%) menyatakan sangat kurang. Secara keseluruhan **nilai rata – rata 3,6**, artinya tingkat kesiapan pada parameter ini adalah cukup. Berdasarkan konfirmasi hasil wawancara, seperti disampaikan Deny Syaiful (JF PTP Pusdiklat) pada aspek pemanfaatan teknologi mencapai nilai tertinggi, memang pada kenyataannya pusdiklat sudah menggunakan teknologi yang terkini (update), mulai dari proses penentuan pelatihan sampai dengan evaluasi pelatihan.
11. Hasil survei menunjukkan bahwa parameter Penyelarasan Strategi Manajemen Pengetahuan dengan Strategi Manajemen Perubahan, 0 responden (0%) menyatakan sangat baik, 13 responden (32%) menyatakan baik, sementara 18 responden (44%) menyatakan cukup baik, 5 responden (20%) menyatakan kurang, dan 2 responden (5%) menyatakan sangat kurang. Secara keseluruhan **nilai rata – rata 3.0**, artinya tingkat kesiapan pada parameter ini adalah cukup.
12. Hasil survei menunjukkan bahwa parameter Mekanisme berkala penyempurnaan dan pengembangan pengetahuan, 1 responden (2%) menyatakan sangat baik, 15 responden (37%) menyatakan baik,

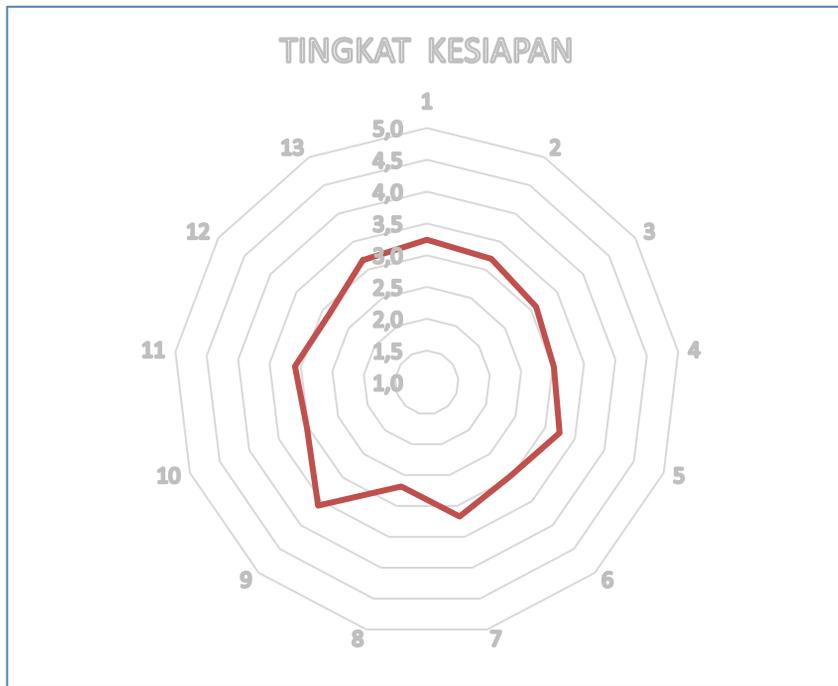
sementara 15 responden (37%) menyatakan cukup baik, 7 responden (17%) menyatakan kurang, dan 3 responden (7%) menyatakan sangat kurang. Secara keseluruhan **nilai rata – rata 3,1**, artinya tingkat kesiapan pada parameter ini adalah cukup.

13. Hasil survei menunjukkan bahwa parameter Pembangunan *Community Of Practice* (CoP) Manajemen Pengetahuan, 1 responden (2%) menyatakan sangat baik, 8 responden (19%) menyatakan baik, sementara 20 responden (49%) menyatakan cukup baik, 9 responden (22%) menyatakan kurang, dan 3 responden (7%) menyatakan sangat kurang. Secara keseluruhan **nilai rata – rata 2,9**, artinya tingkat kesiapan pada parameter ini adalah kurang. Berdasarkan konfirmasi hasil wawancara, seperti disampaikan Iqbal (Koorbid Pengembangan Database) sebetulnya CoP telah terbangun di BMKG sebelum istilah Corpu dikenal di BMKG. Banyak WAG yang membahas detail tentang suatu kasus tertentu dan hanya diikuti oleh ahli di bidangnya. Sementara Puji Setiyani (Koorbid P3M Pusdiklat) menyampaikan Pembangunan CoP membutuhkan kekuatan penuh dari bawah untuk menentukan output-output yang mendorong BMKGCorPu.

Secara keseluruhan hasil survei, nilai rata-rata adalah 3.11, sehingga dapat disampaikan bahwa Tingkat Kesiapan Penerapan KMS di Pusdiklat BMKG masuk kategori tingkat kesiapan cukup. Nilai tertinggi adalah pada Parameter 9 : 3.59, yaitu Pemanfaatan Teknologi dalam Manajemen Pengetahuan. Sedang nilai terendah adalah Parameter 8 : 2.68, yaitu Payung Hukum Manajemen Pengetahuan.

Sementara itu, ada 3 (tiga) parameter yang masih masuk kategori kurang yaitu : Parameter 12 : 2.88 adalah Pembangunan *Community Of Practice* (CoP) Manajemen Pengetahuan, Parameter 9 : 2,68 adalah Penyediaan Payung Hukum dan Regulasi Manajemen Pengetahuan dan Parameter 6 : 2.98 adalah Mengembangkan Strategi Implementasi Manajemen Pengetahuan.

Memperhatikan uraian di atas, dari 13 (tiga belas) parameter kesiapan, telah masuk kategori tingkat kesiapan cukup sebanyak 10 (sepuluh) parameter atau 77%, dan masih ada 3 (tiga) parameter yang masih dalam kategori tingkat kesiapan kurang atau 23%.



Gambar 2 : Grafik Tingkat Kesiapan

B. Model Pengembangan Kms Bmkg

a. LMS Pusdikalt BMKG

Pusdiklat BMKG telah mengoperasionalkan *Learning Management System (LMS)* sejak 2013. Keberadaan LMS Pusdiklat BMKG hingga saat ini dirasakan sangat membantu kelancaran proses belajar - mengajar di lingkungan BMKG. Dalam LMS, hal -hal yang berhubungan dengan kegiatan belajar-mengajar telah tersedia dan terbaru (*ter update*) secara berkala (*real time*). Sesuai dengan jadwal kegiatan Diklat. Namun seperti hasil kajian Arisman (2020), LMS belum mampu menjangkau seluruh pegawai BMKG, kecuali bagi SDM yang terlibat dalam proses kegiatan belajar-mengajar, antara lain peserta, pengelola, penyelenggara, widyaiswara, tutor, coache, penguji. Secara garis besar kondisi LMS Pusdiklat BMKG dapat disampaikan dalam Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 : Menu LMS Pusdiklat BMKG
C.

LMS	MENU UTAMA	SUB MENU
	Beranda	Berita
		Profil
		Kalender Kegiatan
		Dasar Hukum
		Media
		Prosiding
		Widyaiswara
	Diklat	Teknis
		Fungsional
		Kepemimpinan
		Latsar CPNS
		Sesi Online
		Lain - lain
	Beasiswa	Tahun 2017
		Tahun 2018
		Tahun 2019
		Tahun 2020
	Simdiklat	
	Dukungan	FAQ
		Templete

b. Model Pengembangan KMS BMKG

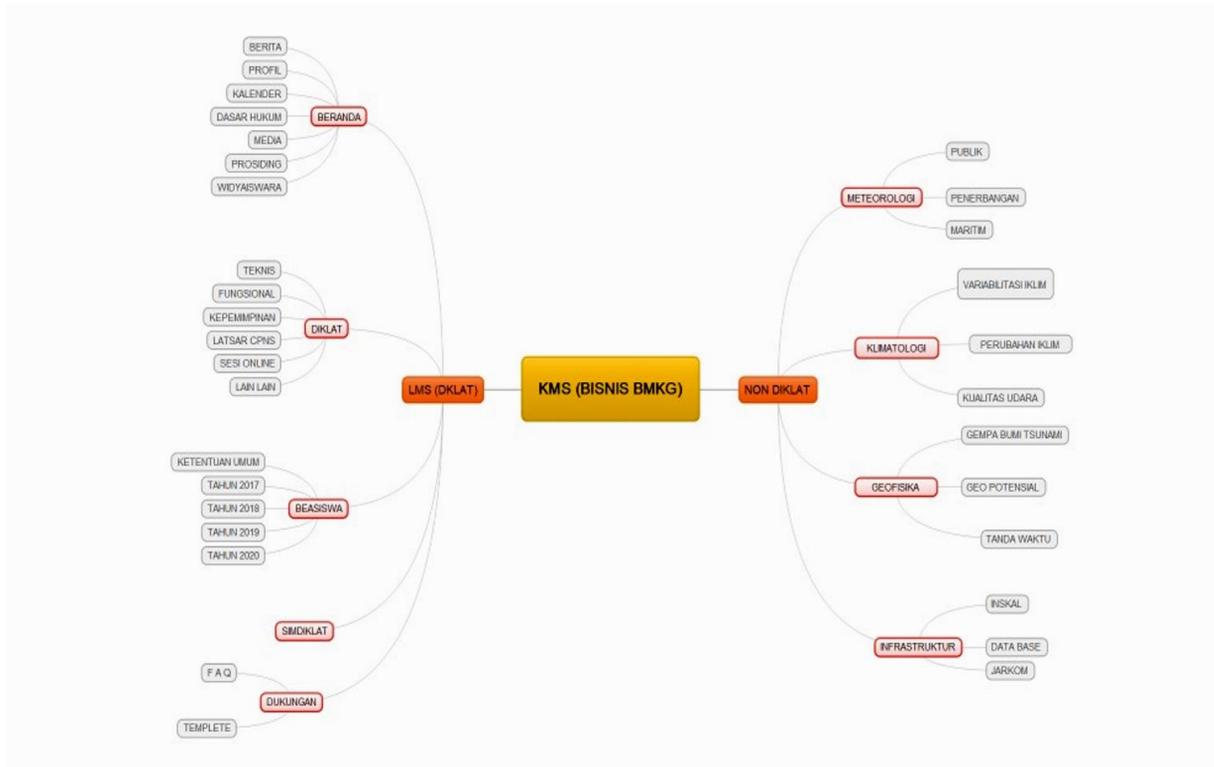
Berdasarkan UU 31 tahun 2009 tentang MKG, pada pasal 29 ayat 1 menyebutkan bahwa Pemerintah wajib menyediakan pelayanan informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika. Selanjutnya pada pasal 36 disampaikan bahwa pelayanan informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika hanya dilaksanakan oleh Badan, dalam hal ini adalah Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Selanjutnya KMS BMKG harus mampu menampung kebutuhan Manajemen Pengetahuan sesuai proses bisnis BMKG. Memperhatikan kondisi saat ini, dari produk informasi yang diterbitkan BMKG, dapat disampaikan bahwa produk informasi masing-masing kedeputian secara garis besar, adalah sebagai berikut :

1. Kedeputian Meteorologi, produk informasinya dapat dikelompokkan menjadi : Informasi Cuaca Publik, Informasi Cuaca Penerbangan dan Informasi Cuaca Maritim.
2. Kedeputian Klimatologi, produk informasinya dapat dikelompokkan menjadi : Informasi Variabilitas Iklim, Informasi Perubahan Iklim dan Informasi Kualitas Udara.

3. Kedeputan Geofisika, produk informasinya dapat dikelompokkan menjadi : Informasi Gempabumi, Informasi Tsunami, Informasi Geofisika Potensial, Informasi Tanda Waktu dan Informasi Magnit.

4. Unit Pendukung

- Kedeputan Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa dan Jaringan Komunikasi sebagai pendukung binsnis utama BMKG, melakukan pengelolaan peralatan observasi, jaringan komunikasi dan data MKG.
- Sekretariat Utama sebagai unsur pendukung manajemen, mengelola Aset, Keuangan, SDM, Perencanaan, Hukum dan Organisasi.



Gambar 3 :Diagram Pengembangan LMS menjadi KMS

Pembangunan KMS BMKG diharapkan akan mampu memenuhi kebutuhan berbagi (share) informasi dan pengetahuan untuk seluruh jajaran BMKG, baik yang ada di Kantor Pusat, maupun di UPT yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk maksud tersebut, maka KMS BMKG diharapkan dapat menampung keperluan yang terkait dengan proses kegiatan belajar-mengajar dan menampung kebutuhan pengetahuan seluruh jajaran BMKG di luar urusan kediklatan. Secara garis besar dapat disampaikan sebagai berikut :

- BISNIS DIKLAT : sesuai LMS Pusdiklat BMKG saat ini hanya diperuntukkan bagi pegawai yang sedang mengikuti Diklat, Widyaiswara, Mentor, Coach, Fasilitator, Pengelola dan Penyelenggara Diklat.
- BISNIS NON DIKLAT : sebagai sarana pertukaran pengetahuan (*knowledge sharing*) untuk seluruh pegawai BMKG, sesuai proses bisnis BMKG.

Secara grafis konsep pengembangan LMS Pusdiklat BMKG menjadi KMS BMKG dapat disampaikan seperti Gambar 3 atas .

2.1.1. Hasil Temuan Utama

1. Secara keseluruhan BMKG telah menunjukkan kesiapan dalam penerapan KMS, utamanya dalam aspek teknis dan SDM, namun pada aspek non teknis masih butuh perhatian lebih tinggi.
2. Tingkat kesiapan dari aspek non teknis masih dalam kategori kurang siap, sehingga perlu dorongan agar dapat mengimbangi kesiapan dalam aspek teknis. Aspek yang masih perlu perhatian antara lain : Mengembangkan Strategi Implementasi Manajemen Pengetahuan, Pembangunan *Community Of Practice* (CoP) Manajemen Pengetahuan dan Penyediaan Payung Hukum dan Regulasi Manajemen Pengetahuan.
3. Konsep Pembangunan KMS BMKG yang ditawarkan diharapkan akan mampu memenuhi kebutuhan berbagi (*share*) informasi dan pengetahuan untuk seluruh jajaran BMKG, baik yang ada di Kantor Pusat, maupun di UPT yang tersebar di seluruh Indonesia.

2.2. Manfaat Hasil Temuan

Berdasarkan hasil temuan yang telah disampaikan di atas, manfaat yang dapat didiambil dari kajian ini adalah :

1. Memahami peta kondisi kesiapan Pusdiklat BMKG untuk membangun KMS seperti anamah Permen PANRB Nomor 14 tahun 2011 tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*).
2. Mengenali kekurangan yang harus segera diperbaiki dalam rangka membangun KMS di Pusdiklat BMKG
3. Mempunyai konsep alternaif model pengembangan KMS BMKG sebagai model pembanding dalam membangun KMS di Pusdiklat BMKG.

BAB III PENUTUP

2.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data survei tentang tingkat kesiapan Pusdiklat BMKG dalam menerapkan KMS, sesuai Permen PANRB Nomor 14 tahun 2011 dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pusdiklat BMKG telah menunjukkan tingkat kesiapan pada kategori cukup siap dalam penerapan KMS, utamanya dalam aspek teknis dan SDM, namun pada aspek non teknis masih pada kategori kurang siap
- b. Tingkat kesiapan penerapan KMS di Pusdiklat BMKG, dengan nilai rata-rata adalah 3.11 dari skala 5, sehingga masuk pada kategori tingkat kesiapan cukup, Dari 13 (tiga belas) parameter kesiapan penerapan KMS di Pusdiklat BMKG, sebanyak 10 (sepuluh) parameter atau 77% telah masuk kategori tingkat kesiapan cukup, dan masih ada 3 (tiga) parameter atau 23% masih pada kategori tingkat kesiapan kurang
- c. Aspek yang perlu mendapat perhatian adalah Produk Hukum yang akan memayungi penerapan KMS, antara lain mengatur tentang teknis operasional KMS dan kewajiban berbagi (*knowledge sharing*) dalam KMS
- d. Pembangunan KMS BMKG diharapkan akan mampu memenuhi kebutuhan berbagi (*share*) informasi dan pengetahuan untuk seluruh jajaran BMKG, baik yang ada di Kantor Pusat, maupun di UPT yang tersebar di seluruh Indonesia.

2.2. Saran / Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tentang tingkat kesiapan Pusdiklat BMKG, selanjutnya dapat disampaikan saran/rekomendasi

1. Agar Pusdiklat BMKG mendorong percepatan peningkatan kesiapan pembangunan KMS yang masih yang nilai indek kesiapan masih rendah, antara lain :
 - a. Mendorong percepatan adanya Peratutran Kepala BMKG tentang KMS BMKG
 - b. Mendorong percepatan adanya Peratutran Kepala BMKG membangun budaya berbagai bagi jajaran Pimpinan dan Staf BMKG

- c. Memfasilitasi dan mendokumentasikan diskusi para teknisi dan ahli dalam bidangnya yang selama ini telah berlangsung.
2. Agar Pusdiklat BMKG, mengembangkan LMS Pusdiklat BMKG menjadi KMS BMKG yang mampu memenuhi kebutuhan berbagi (share) informasi dan pengetahuan untuk seluruh jajaran BMKG, baik yang ada di Kantor Pusat, maupun di UPT yang tersebar di seluruh Indonesia